

# THE "DISCOVERER" OF PANCASILA AND THE ABUSE OF HISTORY IN INDONESIAN SCHOOL TEXTBOOKS

Penggal Pancasila, Penyalahgunaan Sejarah dalam Buku Teks Sekolah

Hieronymus Purwanta <sup>1a(\*)</sup> Andrea Salsalova <sup>2b</sup>

<sup>12</sup>Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) Universitas Sebelas Maret

<sup>a</sup>[hpurwanta@staff.uns.ac.id](mailto:hpurwanta@staff.uns.ac.id)

<sup>b</sup>[andreasalsalova774@gmail.com](mailto:andreasalsalova774@gmail.com)

(\*) Corresponding Author

[hpurwanta@staff.uns.ac.id](mailto:hpurwanta@staff.uns.ac.id)

**How to Cite:** Purwanta, H & Salsalova, A. (2026). The "Discoverer" of Pancasila and The Abuse of History in Indonesian School Textbooks. doi: [10.36526/js.v3i2.8878](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.8878)

## Abstract

Received : 04-04-2026  
Revised : 21-05-2026  
Accepted : 24-06-2026

## Keywords:

Pancasila;  
textbooks;  
historiography;  
abuse of history;  
BPUPK

This study examines the controversy surrounding the "discoverer" of Pancasila, its representation in Indonesian school textbooks, and its pedagogical implications. The controversy stems from conflicting textbook narratives, with some portraying Sukarno as the sole figure who articulated the philosophical foundation of the Indonesian state, while others attribute the proposal of Pancasila to several members of the BPUPK. Using the historical method combined with qualitative content analysis, this study examines Pancasila and History textbooks alongside primary sources, including the official BPUPK minutes, testimonies of historical participants, and relevant historiographical scholarship. The analysis is guided by Marc Ferro's framework on the use and abuse of history. The findings show that the controversy originated in a historiographical construction developed during the New Order period and subsequently reproduced through school textbooks. Source criticism further reveals that the documents used to support Muhammad Yamin's claim as the first proposer of Pancasila lack sufficient authenticity and credibility. The study also identifies selective use of evidence, omission of critical information, and unequal representation of historical actors. It concludes that history instruction should incorporate digitally accessible primary sources to foster source criticism, historical literacy, and critical thinking, while textbook development should be grounded in rigorous historical scholarship.

## PENDAHULUAN

Buku teks merupakan penjabaran kurikulum yang berfungsi sebagai sumber belajar utama bagi peserta didik. Oleh karena itu, isinya harus memenuhi prinsip keakuratan konsep, fakta, dan perkembangan keilmuan agar mendukung pembelajaran yang ilmiah (Br Gultom et al., 2024; Janah et al., 2024; Mayandri et al., 2022). Di sisi lain, buku teks juga berperan dalam pembentukan identitas nasional (*nation building*), sehingga penyajian sejarah sering kali tidak sepenuhnya terlepas dari kepentingan negara (Clark et al., 2024). Persoalan muncul ketika narasi sejarah disusun melalui seleksi fakta, penghilangan informasi, atau penonjolan tokoh tertentu sehingga bertentangan dengan bukti sejarah yang tersedia.

Salah satu persoalan tersebut adalah kontroversi mengenai penggal Pancasila. Dalam konteks pendidikan, perbedaan narasi dalam buku teks berpotensi membentuk pemahaman yang berbeda mengenai proses perumusan dasar negara Indonesia. Pada buku teks berjudul Pendidikan Pancasila SMP Kelas VII untuk Kurikulum Merdeka karangan Yayasan Suryatna, Ai Tin Sumartini, Devita Puspa Sari, dan Dwi Indah Mustiko Ningrum dituliskan:

*"Setelah 3 (tiga) hari sidang berlangsung tidak ada satupun peserta sidang yang menjawab pertanyaan ketua sidang tentang dasar filsafat negara, barulah pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya Ir. Sukarno menyampaikan pemikirannya tentang dasar filsafat negara yang mengandung prinsip: Kebangsaan; Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan; Mufakat atau*

*Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; dan Ketuhanan. Dasar filsafat negara itu kemudian diberi nama Pancasila, yang menjadi pemersatu seluruh elemen bangsa (Suryatna et al., 2023, p. 14)."*

Sebaliknya, buku teks pelajaran sejarah SMA Kelas XI untuk Kurikulum Merdeka karangan Martina Safitry, Indah Wahyu Puji Utami, dan Zein Ilyas dinyatakan:

*"Dalam sidang tersebut, ada empat orang tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar filsafat negara, yaitu Muh. Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Supomo, dan Sukarno. Pada hari terakhir dari sidang itulah Sukarno menyampaikan gagasannya tentang dasar filsafat negara yang ia namakan Pancasila. Oleh karenanya, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila (Safitry et al., 2022, p. 124)."*

Perbedaan narasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai representasi sejarah yang lebih sesuai dengan sumber-sumber primer.

Kajian ini bertujuan menemukan kebenaran akademik mengenai penggali Pancasila sebagai dasar filsafat negara melalui kritik terhadap sumber-sumber sejarah yang digunakan dalam buku teks sekolah serta menjelaskan implikasi pedagogisnya bagi pembelajaran sejarah berbasis sumber primer digital. Apabila ditinjau dari buku teks mata pelajaran PPKn dan Sejarah, baik sebelum maupun sesudah Reformasi semuanya mendukung pernyataan buku teks sejarah SMA Kelas XI untuk Kurikulum Merdeka, dalam arti banyak tokoh terlibat dan menyumbangkan pikiran tentang dasar filsafat negara Indonesia merdeka. Pandangan yang sama juga muncul di internet apabila pada mesin pencari dituliskan "sejarah kelahiran Pancasila". Meskipun demikian, kebenaran akademik bukan ditentukan oleh besar kecilnya jumlah pihak yang setuju terhadap suatu pendapat. Dalam Ilmu Sejarah, secara akademik suatu pernyataan dikatakan benar apabila mengandung kebenaran korelasi dan koherensi. Kebenaran korelasi adalah kebenaran yang didukung dengan bukti empiris. Di pihak lain, kebenaran koherensi adalah kebenaran yang didukung oleh pemikiran rasional dan logis.

Untuk menemukan kebenaran akademik tentang penggali Pancasila dalam sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, permasalahan yang diajukan adalah bagaimana asal muasal kontroversi tentang penggali Pancasila dan mengapa terjadi kontroversi tentang penggali Pancasila?

## METODE

Kajian ini menggunakan metode sejarah (Kuntowijoyo, 2003) yang dipadukan dengan analisis isi (*content analysis*) (Krippendorff, 2019; Mayring, 2014; Schreier, 2012) terhadap buku teks sekolah. Sumber utama penelitian adalah buku teks Pendidikan Pancasila SMP Kelas VII Kurikulum Merdeka yang menyatakan bahwa selama tiga hari sidang BPUPK tidak ada peserta yang menjawab pertanyaan mengenai dasar filsafat negara dan bahwa Sukarno merupakan tokoh pertama yang mengemukakan dasar negara pada 1 Juni 1945. Sebagai pembanding digunakan buku teks Sejarah SMA Kelas XI Kurikulum Merdeka, buku teks PPKn dan Sejarah dari berbagai kurikulum, serta sumber primer dan sekunder mengenai sidang BPUPK.

Kerangka teoritik penelitian mengacu pada pemikiran Marc Ferro dalam *The Use and Abuse of History* (Ferro, 1984). Ferro membedakan penggunaan sejarah sebagai sarana pembentukan identitas kolektif dari penyalahgunaan sejarah (*abuse of history*), yaitu manipulasi atau distorsi masa lampau melalui seleksi, penghilangan, atau penafsiran fakta yang bertentangan dengan bukti sejarah untuk melayani kepentingan ideologis atau politik (Apple, 1993; Baets, 2013). Dalam penelitian ini, konsep tersebut dioperasionalkan melalui empat indikator analitis, yaitu: (1) seleksi fakta sejarah (Heryanto, 2018); (2) penghilangan fakta yang relevan (Trouillor, 1995); (3) penonjolan atau peminggiran tokoh sejarah (Loewen, 1995); dan (4) fungsi ideologis narasi sejarah dalam membangun legitimasi politik atau identitas kolektif (Wood, 2005).

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi narasi mengenai penggali Pancasila dalam buku teks. Kedua, memverifikasi narasi tersebut melalui perbandingan dengan

notulen sidang BPUPK, kesaksian pelaku sejarah, dan hasil penelitian para sejarawan. Ketiga, menafsirkan temuan menggunakan perspektif Marc Ferro untuk menilai apakah narasi yang disajikan sesuai dengan bukti sejarah atau menunjukkan bentuk penyederhanaan, seleksi, dan penghilangan fakta yang berpotensi menghasilkan penyalahgunaan sejarah.

Keabsahan data diperoleh melalui kritik sumber eksternal dan internal terhadap seluruh dokumen yang digunakan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan asal-usul kontroversi mengenai penggali Pancasila serta mekanisme pembentukan narasi sejarah dalam buku teks sekolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Asal Muasal Kontroversi*

Kontroversi sejarah kelahiran Pancasila muncul dalam konteks politik historiografi Orde Baru yang berupaya membangun narasi sejarah nasional yang seragam. Pada dekade 1970-an, negara menempatkan sejarah sebagai instrumen pembentukan kesadaran kebangsaan melalui proyek penulisan sejarah nasional dan kurikulum sekolah (McGregor, 2007). Dalam proses tersebut, sejarawan yang memiliki kedekatan dengan negara memperoleh posisi strategis dalam menentukan interpretasi resmi terhadap berbagai peristiwa sejarah, termasuk sejarah perumusan Pancasila.

Tokoh sentral kontroversi sejarah kelahiran Pancasila adalah Nugroho Notosusanto. Dia adalah sejarawan profesional (Sutherland, 2008), karena menjalani pendidikannya sebagai sejarawan di Universitas Indonesia. Akan tetapi dia juga merupakan politikus, karena melalui jabatannya sebagai Kepala Dinas Sejarah Angkatan Bersenjata (DISJARAH ABRI) melakukan berbagai manuver untuk mengembangkan kekuasaan Orde Baru melalui kurikulum sejarah (Purwanta, 2024).

Jejak kontroversi sejarah kelahiran Pancasila paling tua ditemukan pada narasi buku teks sejarah untuk kurikulum 1975 yang disusun oleh tim dibawah pimpinan Nugroho Notosusanto (Notosusanto & Basri, 1981). Buku teks itu menjelaskan bahwa pada sidang 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengusulkan lima "Asas dan Dasar Negeri Kebangsaan Republik Indonesia" yaitu (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, (5) Kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut diceritakan bahwa tiga hari kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengucapkan pidato mengenai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang juga terdiri atas 5 asas yakni: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, (3) Mufakat atau demokrasi, (4) Kesejahteraan sosial, (5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Notosusanto & Basri, 1981, p. 122).

Penempatan Muhammad Yamin sebagai tokoh yang telah merumuskan lima asas dasar negara sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 memiliki implikasi historiografis yang signifikan. Narasi tersebut menggeser posisi Soekarno dari penggagas utama Pancasila menjadi salah satu tokoh yang berkontribusi dalam proses perumusan dasar negara. Dengan demikian, lahir kesan bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran kolektif yang telah muncul sebelum pidato 1 Juni 1945.

Narasi dalam buku teks merupakan kristalisasi wacana Nugroho Notosusanto yang telah diuraikan mendalam pada buku *Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik* (1979b) dan pada artikel berjudul "Mengamankan Pancasila sebagai Dasar filsafat negara" (Notosusanto, 1979a). Narasi yang diproduksi Nugroho Notosusanto adalah bahwa Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 menyampaikan pidato yang berjudul Asas dan Dasar filsafat negara kebangsaan Indonesia yang di dalamnya memuat gagasan tentang lima prinsip landasan filosofis negara. Lima prinsip dari Yamin isinya mirip dengan lima sila yang disampaikan Soekarno pada tiga hari kemudian, yaitu tanggal 1 Juni 1945 (Notosusanto, 1979b, p. 19). Selanjutnya dinyatakan bahwa Pancasila yang otentik adalah Pancasila yang termuat pada pembukaan konstitusi (Notosusanto, 1979a, p. 2).

Narasi sejarah kelahiran Pancasila memperoleh perhatian luas ketika ditulis pada surat kabar harian Sinar Harapan pada 3 Agustus 1981 dengan judul "Proses Perumusan Pancasila Dasar filsafat negara" (Sudibyo, 1998). Reaksi publik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu politik dan

akademik. Reaksi politis antara lain disampaikan oleh Yayasan Soekarno-Hatta melalui Deklarasi Pancasila yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1981 dan ditandatangani oleh 17 tokoh nasional. Deklarasi itu menyatakan bahwa hari lahirnya Pancasila adalah 1 Juni 1945 dan Soekarno adalah satu-satunya orang yang mengemukakan Pancasila sebagai dasar filsafat negara (Purwanta, 2012). Dari perspektif akademik muncul sejarawan tingkat nasional seperti Kuntowijoyo, Abdurachman Suryomihardjo, G. Moedjanto, dan Ruben Nalenan. Kritik akademik terhadap Nugroho Notosusanto terutama diarahkan pada penggunaan sumber sejarah.

Para pengkritiknya menilai bahwa naskah pidato Muhammad Yamin yang memuat lima asas tidak memiliki validitas yang memadai sebagai sumber primer untuk sidang 29 Mei 1945. Permasalahan tersebut membuka pertanyaan mendasar mengenai autentisitas dokumen dan kesesuaian antara dokumen yang digunakan dengan notulensi resmi sidang BPUPK. Salah satu kritik tajam yang berhasil meruntuhkan bangun narasi sejarah kelahiran Pancasila adalah kekurangtelitian Nugroho Notosusanto dalam melakukan kritik sumber. G. Moedjanto menemukan bahwa pidato Mohammad Yamin yang berjudul "Asas dan Dasar Negeri Kebangsaan Republik Indonesia" adalah sumber yang tidak dapat dipercaya (Purwanta, 2015).

Selain kritik metodologis dari kalangan akademisi, narasi Nugroho Notosusanto juga memperoleh sanggahan dari para pelaku sejarah sendiri. Kesaksian anggota BPUPK yang tergabung dalam Panitia Lima menunjukkan adanya perbedaan mendasar mengenai isi pidato Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Keterangan Muhammad Hatta bahwa rumusan lima sila yang diklaim sebagai pidato Yamin sesungguhnya berasal dari catatan Soekarno memperlihatkan adanya pertentangan langsung antara memori pelaku sejarah dan konstruksi historiografis Orde Baru.

Pandangan Nugroho Notosusanto juga berbeda dari kesaksian eks anggota BPUPK yang tergabung dalam Panitia Lima. Mereka mengikuti secara aktif proses sidang penyusunan dasar filsafat negara. Pada rapat Panitia Lima tanggal 10 Januari 1975, salah satu topik pembahasan yang mengemuka adalah tentang isi pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Hatta menjelaskan bahwa sebenarnya pidato itu merupakan pidato Soekarno pada sidang panitia kecil. Rumusan yang berupa tulisan tangan Soekarno dipinjam Muhammad Yamin dan tidak pernah dikembalikan. Soekarno lah satu-satunya yang tegas-tegas mengusulkan *filosofische grondslag* (Hatta et al., 1980, pp. 59-60).

### **Pengujian Kebenaran Akademik**

Kebenaran akademik suatu narasi sejarah ditentukan oleh kualitas sumber yang digunakan serta ketepatan penafsiran terhadap sumber tersebut. Oleh karena itu, narasi mengenai peranan Muhammad Yamin dalam kelahiran Pancasila perlu diuji melalui kritik eksternal terhadap autentisitas dokumen dan kritik internal terhadap kesesuaian isi dokumen dengan konteks historis sidang BPUPK. Dalam konteks buku pelajaran sejarah untuk Kurikulum 1975, salah satu sumber primer utama yang digunakan oleh pengarang adalah naskah yang diklaim sebagai pidato Mohammad Yamin pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945. Naskah itu terdapat pada buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara dengan judul *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Bahar et al., 1992, pp. 1-23).

Naskah pidato Moh. Yamin diberi judul Azas Dan Dasar filsafat negara Kebangsaan Republik Indonesia dan memuat lima azas seperti dituliskan dalam buku teks sejarah Kurikulum 1975. Permasalahan pada sumber sejarah itu terdapat pada alinea terakhirnya, yaitu pernyataan "Dua hari jang lampau tuan Ketua memberi kesempatan kepada kita sekalian djuga boléh mengeluarkan perasaan. Mémang orang Indonésia berpikir dengan hati dan berasa dengan djantung. Baiklah sebagai penutup saja tjurahkan perasaan saja dengan sja'ir" (Bahar et al., 1992, p. 22). Kata "Dua hari yang lampau" apabila dihitung dari tanggal Moh Yamin berpidato dapat diartikan sebagai tanggal 27 Mei 1945. Pada tanggal 27 Mei itu anggota BPUPK belum melakukan sidang, sehingga tidak mungkin ada pernyataan ketua sidang. Agenda anggota BPUPK pada tanggal 27 Mei adalah:

- 9.00 *Zimukyoku Zityoo* (Wakil Kepala Kantor/Tata Usaha) menghadap *Soomubutyoo* (Kepala Bagian Urusan Umum).
- 10.15 Kumpul di *Gunseikanbu* (Kantor *Gunseikan*).
- 10.30 *Sinkoku* (Laporan) pada P.Y.M. *Gunseikan*.  
 Sesudah *sinkoku* diminta datang di gedung *Tyuuoo Sangi In*.  
 Pergi ke *Tjoeraido* (Tempat penyimpanan abu tentara Jepang yang gugur).  
 Kembali ke gedung *Tyuuoo Sangi in* buat terima petunjuk-petunjuk dari *Zimukyokutyoo*.
- 19.30 Perjamuan di hotel Miyako oleh P.T. Itibangase (Sabri et al., 2024, p. 53)

Melalui pencocokan antara pernyataan dalam penutup pidato Moh. Yamin dengan agenda kegiatan anggota BPUPK dapat diambil pemahaman bahwa naskah pidato Moh. Yamin itu menimbulkan keraguan serius mengenai autentisitas dokumen tersebut sebagai transkrip pidato yang benar-benar disampaikan pada sidang 29 Mei 1945, sehingga tidak dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Dengan demikian, tulisan yang mendasarkan diri pada dokumen palsu itu tidak memiliki kebenaran akademik.

Keraguan terhadap autentisitas naskah yang diterbitkan Sekretariat Negara semakin menguat apabila dibandingkan dengan catatan pidato Muhammad Yamin sendiri yang berhasil ditemukan kemudian. Dokumen berupa tulisan tangan Moh. Yamin tentang isi pidato yang disampaikannya pada tanggal 29 Mei 1945 ditranskripsi sebagai berikut:

*Bahan-bahan jangan saja dicari di Jawa, tetapi di seluruh Indonesia: Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. Tiga usaha yang harus dilakukan:*

1. Mengumpulkan bahan-bahan untuk pembentukan negara;
2. Menyusun undang-undang dasar filsafat negara;
3. Menjalankan isi hukum dasar filsafat negara Indonesia.

*Indonesia Merdeka, sekarang!*

**I. E'tat nation** = nationale staat = negara kebangsaan

*Dasar kemerdekaan = kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.*

*Kedaulatan ke dalam: memberi perlindungan dan pengawasan pada putra negeri.*

*Kedaulatan ke luar: kesempatan luas mengatur pertaliannya dengan negara lain.*

*Bukan dominion, protectoraat, mandaat, Atlantic Charter.*

**II. Tujuan Kemerdekaan:** dasar kemanusiaan (*internasionalisme*), dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara.

**III. Ke-Tuhanan**

*Peradaban Indonesia mempunyai Ketuhanan Yang Maha Esa.*

**IV. Dasar-dasar yang tiga:**

A. *Pemusyawaratan (Quran) - mufakat (adat)*

B. *Perwakilan (adat)*

C. *Kebijaksanaan (rationalisme)*

1. *Negara rakyat Indonesia:*

**I. Republik;** *Negara Kesatuan, paham unitarisme*

**II. Satu kedaulatan:** *yang dijunjung oleh Kepala Negara, daerah dan rakyat*

**III. Kepala Negara,** *pemerintah daerah, dan pemerintahan persekutuan desa (nagari, marga, dll.) dipilih secara timur dalam pemusyawaratan yang disusun secara rakyat. Pemerintahan Syariah*

**IV. Permasyarakatan,** *pemilihan, dan pembaruan pikiran menjadi dasar pengangkatan dari segala pemutusan urusan negara.*

**V. Nagari,** *desa, dan segala persekutuan hukum adat yang diperbarui dengan jalan rationalisme dan pembaruan zaman, dijadikan kaki susunan negara sebagai bagian bawah.*

**VI. Pemerintah Pusat** *dibentuk disekeliling Kepala Negara terjadi atas:*

a. *Dua orang Wakil Kepala Negara*

b. *Satu kementerian sekeliling seorang Perdana Menteri*

c. *Pusat Parlemen Badan-Badan Perwakilan, yang terbagi atas Balai*

*Pertemuan dan Balai Perwakilan Rakyat*

**VII. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah** sebagai Pemerintah Daerah. Untuk Pemerintah Urusan Dalam, Pangreh Praja sekarang mementingkan kekuasaan kepada Negara Indonesia dan Pemerintah. Urusan Dalam bagi seluruh Indonesia disusun kembali.

**VIII. Pekerjaan atas jalan desentralisasi** atau dekonsentrasi yang tidak mengenal federalisme atau perpecahan negara.

**IX. Indonesia menjadi anggota yang berkedaulatan dalam permusyawaratan bangsa-bangsa Asia Timur Raya dan dalam persaudaraan bangsa-bangsa sedunia.**

1. Negara Rakyat Indonesia, bukan negara golongan, negara angkatan atas, atau negara bangsawan.
2. Pembelaan: Perang Jihad (agama) - perang keraman (adat), menyempurnakan teknik dan disipiin peperangan dan menyusun siasat perang (rationalisme)
3. Budi (moral) Negara Indonesia: yang ketiga.
  - a. Setia negara: rasa kebaktian (Syailendra dan Sriwijaya) I
  - b. Tenaga rakyat: kekuatan rakyat (Majapahit – Gajah Mada) II
  - c. Kemerdekaan: ingin merdeka (Indonesia Merdeka) III.

**X. Kesejahteraan rakyat:** Perubahan besar tentang kesejahteraan yang mengenai kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari yang mengenai diri putra-putra negeri.

- a. Daerah Negara. Kemauan angkatan muda Indonesia: Sumatera, Jawa, Malaya, Borneo Selebes, Sunda Kecil, Maluku, Papua.
- b. Penduduk dan Putera Negara. Sebelum hari pelantikan Negara, diadakan ketentuan tentang kedudukan golongan Peranakan, Arab, dan Tionghoa. Jalan memasuki daerah keputeraan terbuka seluas-luasnya.
- c. Bentuk Negara: Berkat bantuan Bala Tentara Dai Nippon dan berkat kesungguhan perjuangan rakyat Indonesia, ditakdirkan oleh Tuhan kita naik dari kedudukan jajahan menjadi rakyat Negara Merdeka.

*Syair Republik Indonesia (Sabri et al., 2024, pp. 70-71).*

Catatan pidato tersebut menunjukkan bahwa Muh. Yamin memang membicarakan persoalan negara kebangsaan, kedaulatan, kemanusiaan, ketuhanan, permusyawaratan, dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, susunannya tidak memperlihatkan rumusan lima asas yang identik dengan Pancasila sebagaimana tercantum dalam naskah "Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia". Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara kedua dokumen tersebut.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian Hardinanto (2017) terhadap notulen sidang BPUPK. Berdasarkan notulen sidang, Muhammad Yamin beberapa kali memperoleh teguran dari ketua sidang karena pembicaraannya tidak secara langsung menjawab pertanyaan mengenai dasar filsafat negara. Fakta ini memperkuat indikasi bahwa pidato Yamin pada 29 Mei 1945 tidak berisi perumusan sistematis lima dasar negara sebagaimana diklaim dalam narasi yang kemudian berkembang pada masa Orde Baru.

Berdasarkan kritik terhadap autentisitas dokumen, perbandingan dengan catatan pidato Muhammad Yamin sendiri, dan analisis notulen sidang BPUPK, tidak ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin telah mengemukakan rumusan lima dasar negara yang identik dengan Pancasila. Dengan demikian, klaim yang menempatkan Yamin sebagai pengusul pertama Pancasila tidak memperoleh dukungan yang memadai dari sumber primer yang tersedia.

### **Penyalahgunaan Sejarah**

Penyalahgunaan sejarah dalam penelitian ini adalah manipulasi, distorsi, atau penindasan masa lampau yang dilakukan secara sengaja untuk menipu orang lain atau melayani agenda politik, penanaman nasionalisme, atau kepentingan ideologis masa kini lainnya. Dengan pengertian

tersebut, suatu narasi dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan sejarah apabila mengabaikan, memanipulasi, atau merekonstruksi fakta sejarah demi tujuan kekuasaan.

Pada buku teks sejarah untuk Kurikulum 1984 terjadi revisi yang cukup substansial. Tentang kelahiran Pancasila buku teks menuliskan sebagai berikut:

*... Dalam persidangan pertama pembicaraan dipusatkan kepada usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia Merdeka. Beberapa tokoh pemimpin bangsa antara lain Mr. Muhammad Yamin, Drs. Mohammad Hatta, Dr. Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno berturut-turut menyumbangkan pemikirannya.*

*Pada kesempatan sidang terakhir tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno mengucapkan pidato mengenai dasar filsafat negara Indonesia merdeka. Pidato itu berisi pokok-pokok pikiran yang terdiri atas 5 pokok atau dasar. Oleh karena jumlahnya lima, maka "atas saran seorang teman ahli bahasa" 5 dasar itu oleh Ir. Sukarno dinamakan "Pancasila" (Notosusanto & Basri, 1992, p. 122).*

Dari kutipan di atas terlihat tidak ada lagi ringkasan isi pidato berupa sila-sila dasar filsafat negara yang dikutip, baik dalam pidato Moh. Yamin maupun Sukarno. Ini menunjukkan bahwa kesalahan fatal yang berupa penggunaan sumber palsu telah disadari dan direvisi. Meskipun demikian, buku teks memunculkan nama-nama tokoh yang diklaim sebagai penyumbang pemikiran tentang dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka, yaitu Muh. Yamin, Muh. Hatta, Supomo, dan Sukarno.

Pencantuman nama tokoh itu menarik untuk dibahas lebih lanjut. Pada Kurikulum 1975, buku teks menyebut dua nama tokoh, yaitu Muh. Yamin dan Sukarno, Akan tetapi, pada Kurikulum 1984 bertambah menjadi empat orang tokoh. Dari perspektif akademik, Hatta sudah menyampaikan pernyataan bahwa Soekarno lah satu-satunya yang tegas-tegas mengusulkan *filosofische grondslag* (Hatta et al., 1980, pp. 59-60). Dari sudut pandang ini, pencantuman nama selain Sukarno sebagai penggagas dasar filsafat negara merupakan penyalahgunaan sejarah.

Dari perspektif analisis wacana kritis, terdapat asumsi, ideologi, dan pesan dari pemegang kekuasaan yang hendak disampaikan melalui jumlah dan nama tokoh yang disebut sebagai penyumbang pemikiran tentang dasar filsafat negara. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kepentingan kekuasaan apa yang hendak disampaikan hingga menggunakan penyalahgunaan sejarah?

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Orde Baru sebagai pemegang pemerintahan adalah sangat kuatnya Sukarno dalam memori kolektif masyarakat Indonesia. Selain sebagai bapak proklamator kemerdekaan, Sukarno juga dikenang oleh masyarakat sebagai penggali Pancasila. Pencatuman nama Muh. Yamin pada Kurikulum 1975 dan kemudian bertambah Supomo dan Hatta pada Kurikulum 1984 mengandung pesan bahwa Pancasila bukan gagasan Sukarno seorang diri, tetapi merupakan karya kolektif para *founding fathers*. Permasalahannya adalah peminggiran peran Sukarno dilakukan dengan penyalahgunaan sejarah. Risalah sidang BPUPK menunjukkan bahwa Soepomo lebih banyak membahas teori negara integralistik, hubungan individu dan negara, serta bentuk organisasi negara, bukan merumuskan filosofische grondslag sebagaimana yang dimaksud oleh ketua sidang (Bahar et al., 1992, pp. 25-37). Sementara itu, Hatta menyoroti persoalan hubungan agama dan negara serta aspek ketatanegaraan lainnya (Hardianto, 2017, p. 57).

Proses peminggiran peran Sukarno tidak hanya dilakukan dengan menggunakan buku teks pelajaran sejarah, tetapi dengan berbagai cara, seperti pelarangan terhadap peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni, penggantian nama Gelanggang Olahraga Bung Karno menjadi Gelora Senayan, dan penggantian nama kota Sukarno Pura menjadi Jaya Pura. Pelarangan terhadap peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni dilakukan oleh Orde Baru melalui perintah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) (Suyasa, 2022). Dipihak lain, penggantian Gelora Bung Karno menjadi Gelora Senayan dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 1984 (Wahid, 2001). Sementara itu, penggantian nama kota Sukarnopura menjadi Jaya Pura dilakukan setelah pemerintahan Presiden Sukarno jatuh dan digantikan oleh Orde Baru.

Peminggiran peran Sukarno sebagai penggali Pancasila menggunakan jalan penyalahgunaan sejarah berlanjut ketika pemerintahan Orde Baru runtuh pada 1998. Pada buku teks sejarah untuk Kurikulum 2013 tertulis:

*... Dalam kata pembukaannya Rajiman Wedyodiningrat meminta pandangan kepada para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Orang-orang yang membahas mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Sukarno...*

*Pada kesempatan tersebut Ir. Sukarno juga menjadi pembicara kedua. Ia mengemukakan tentang lima dasar negara. Lima dasar itu adalah (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, (5) Ketuhanan Yang Maha Esa. Pidato itu kemudian dikenal dengan Pancasila.*

*Sementara itu Muh. Yamin dalam pidatonya juga mengemukakan Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Yamin ada lima azas, yaitu (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan rakyat (Sardiman & Lestariningsih, 2014, pp. 60-61).*

Dari kutipan di atas, kiranya cukup jelas bahwa pidato Muh. Yamin yang memiliki masalah pada kredibilitasnya, tetapi dimunculkan sebagai tokoh penyumbang gagasan dasar filsafat negara.

Fenomena menarik terjadi, yaitu pola narasi yang sama juga terdapat pada buku teks PPKn untuk Kurikulum 2013. Buku teks itu menjelaskan sebagai berikut:

Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut.

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Sosial

Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang, konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Soepomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut.

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat (Saputra et al., 2017, pp. 6-7)

Dari kutipan di atas dapat disimak bahwa penyalahgunaan sejarah yang dilakukan oleh buku teks PPKn semakin jauh dari realitas objektif sidang BPUPK. Dijelaskan bahwa selain berpidato, Muh. Yamin juga menyerahkan naskah tertulis. Di pihak lain, pidato Supomo tentang negara integralistik diringkas menjadi lima poin agar mirip dengan Pancasila.

Pola narasi dengan menampilkan beberapa tokoh sebagai penggagas dasar filsafat negara juga terjadi pada buku teks untuk Kurikulum Merdeka. Perbedaannya pada Kurikulum Merdeka dimunculkan nama baru, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, untuk menggantikan Muh. Hatta yang telah ada sejak Kurikulum 1984.

Persoalan yang esensial bukanlah pengakuan terhadap peran Muhammad Yamin, Soepomo, dan Mohammad Hatta atau juga Ki Bagus Hadikusumo dan tokoh-tokoh anggota BPUPK lainnya dalam proses perumusan dasar negara Indonesia. Mereka tetap merupakan tokoh-tokoh penting dalam sejarah pendirian bangsa. Akan tetapi, penyajian mereka dalam buku teks sebagai penggagas dasar filsafat negara yang sejajar dengan Sukarno merupakan persoalan historiografis yang serius. Penyajian tersebut menghilangkan perbedaan mendasar antara kontribusi masing-masing tokoh dan menciptakan kesan bahwa gagasan dasar filsafat negara lahir secara bersamaan dari beberapa tokoh, padahal sumber-sumber sejarah menunjukkan adanya perbedaan substansi yang jelas di antara pidato-pidato yang disampaikan dalam sidang BPUPK. Oleh karena itu, persoalan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kekeliruan penulisan sejarah, melainkan sebagai bagian dari proses konstruksi memori kolektif melalui pendidikan. Dalam konteks tersebut, penyalahgunaan sejarah bekerja bukan dengan menghapus tokoh tertentu dari narasi nasional, tetapi dengan mereduksi kekhasan kontribusinya sehingga makna historis yang sebenarnya menjadi kabur.

## PENUTUP

Kontroversi mengenai penggali Pancasila berakar pada konstruksi historiografi yang berkembang sejak masa Orde Baru dan kemudian direproduksi dalam berbagai buku teks sekolah. Narasi yang menempatkan Muhammad Yamin sebagai pengusul pertama Pancasila memperoleh legitimasi melalui buku teks dan publikasi resmi, meskipun telah lama dipersoalkan oleh para sejarawan maupun pelaku sejarah.

Kritik sumber dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dokumen yang digunakan untuk mendukung klaim tersebut tidak memiliki autentisitas dan kredibilitas yang memadai. Sebaliknya, sumber-sumber primer yang lebih dapat dipercaya memperlihatkan bahwa pidato Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 belum memuat rumusan sistematis mengenai dasar filsafat negara, sedangkan pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 merupakan penyampaian pertama *philosophische grondslag* dalam sidang BPUPK.

Analisis berdasarkan perspektif Marc Ferro menunjukkan bahwa kontroversi ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan fakta sejarah, tetapi juga mencerminkan praktik penyalahgunaan sejarah melalui seleksi fakta, penghilangan informasi, serta penonjolan dan peminggiran tokoh tertentu dalam buku teks. Oleh karena itu, penyusunan buku teks sejarah perlu didasarkan pada kritik sumber yang ketat dan perkembangan penelitian historiografi mutakhir agar narasi sejarah yang disajikan sesuai dengan bukti empiris dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS atas dukungan yang diberikan melalui Hibah Penguatan Kapasitas Grup Riset (PKGR-UNS) dengan nomor kontrak **462/UN27.22/PT.01.03/2026**.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apple, M. W. (1993). *Official Knowledge: Democratic Education in A Conservative Age*. Routledge.
- Baets, A. D. (2013). A theory of the abuse of History. *Revista Brasileira de História*, 33(65), 17-58.
- Bahar, S., Kusuma, A. B., & Hudawati, N. (1992). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) [Notes from the Session of the Investigating Agency for Preparation for Independence (BPUPKI) and the Preparatory Committee for Independence (PPK)]*. Sekretariat Negara RI.
- Br Gultom, M. M. M., Napitupulu, P. V. A., Sirait, P. A. B., Lubis, I. H., & Harahap, S. H. (2024). Peran Buku Teks dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah: Tinjauan Literatur Sistematis. *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(2), 507-513. <https://doi.org/10.57235/hemat.v1i2.2731>

- Clark, P., Llewellyn, K., Capó García, R., & Clifford, S. (2024). Context matters in history textbook studies: A call to address the socio-political landscape of textbook production. *Historical Encounters*, 11(1), 136. <https://doi.org/10.52289/hej11.109>
- Ferro, M. (1984). *The use and abuse of history, or, How the past is taught* (Second ed.). Routledge & Kegan Paul plc.
- Hardianto, A. (2017). Autentisitas Sumber Sejarah Pancasila Dalam Masa Sidang Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. *Veritas et Justitia*, 3(1), 43-64. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2524>
- Hatta, M., Djojoadisurjo, A. S., Maramis, A. A., Sunario, & Pringgogidgo, A. G. (1980). *Uraian Pancasila [The Explanation of Pancasila]*. Mutiara.
- Heryanto, A. (2018). Decolonising Indonesia, Past and Present. *Asian Studies Review*, 42(4), 607-625. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1516733>
- Janah, R., Sholeh, H., & Santoso, S. D. (2024). Analisis Kelayakan Isi dan Bahasa Buku Teks Bahasa Indonesia Edisi Revisi 2017 untuk SMA/SMK Kelas XI Terbitan Kemendikbud dan Relevansinya dengan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Surya Bahtera*, 12.
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Fourth ed.). SAGE Publications, Inc.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana Yogya.
- Loewen, J. W. (1995). *Lies My Teacher Told Me: Everything Your American History Textbook Got Wrong* Touchstone.
- Mayandri, G., Haryadi, H., & Pristiwati, R. (2022). Evaluasi Kelayakan Isi, Materi, Bahasa Dan Keterbacaan Pada Buku Ajar Bahasa Indonesia SMA. *Asas: Jurnal Sastra*, 11(1), 118. <https://doi.org/10.24114/ajs.v11i1.31860>
- Mayring, P. (2014). *Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution* [Interview]. GESIS. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-395173>
- McGregor, K. E. (2007). *History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past*. The National University of Singapore.
- Notosusanto, N. (1979a). Mengamankan Pancasila Dasar Negara. *Persepsi*, 1(1).
- Notosusanto, N. (1979b). *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik* (Second ed.). Balai Pustaka.
- Notosusanto, N., & Basri, Y. (Eds.). (1981). *Sejarah Nasional Indonesia Untuk SMA [The National History of Indonesia for Secondary School]* (Vol. 3). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Notosusanto, N., & Basri, Y. (Eds.). (1992). *Sejarah Nasional Indonesia Untuk SMA [The National History of Indonesia for Secondary School]* (Vol. 3). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purwanta, H. (2012). *Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA: Analisis Isi Dan Wacana Nasionalisme [High School History Textbook: Content and Discourse Analysis from Nationalism]* [Dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia]. Bandung. <http://repository.upi.edu/7565/>
- Purwanta, H. (2015). Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. In A. Haryono (Ed.), *Modul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi: Kearifan Lokal Menasional*. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTİK).
- Purwanta, H. (2024). The New Order Policy Toward History Curriculum for the School. *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 8(2), 10.
- Sabri, M., Balun, P. B. S., Sari, W. D., Siregar, R. A. M., Faozi, A. D., Nusantara, P.,...Pramessti, I. R. (2024). *Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia.
- Safitry, M., Utami, I. W. P., & Ilyas, Z. (2022). *Sejarah untuk SMA/SMK Kelas XII [History for Senior High School/Vocational High School Grade XII]*. Pusat Perbukuan, Badan Standar,

- Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Saputra, L. S., Nurdiaman, A., & Salikun. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTS Kelas 7 [Pancasila and Civics Education for Junior High School Grade VII]*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sardiman, A. M., & Lestariningsih, A. D. (2014). *Sejarah Indonesia untuk SMA [The History of Indonesia for High School] Kelas [Grade] XI Semester 2*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Schreier, M. (2012). *Qualitative Content Analysis in Practice* (First Edition ed.). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781529682571>
- Sudibyo, A. (1998). De-Soekarnoisasi Dalam Wacana Resmi Orde Baru: Kilas-Balik Praktek-Praktek Rekayasa Kebenaran dan Wacana Sejarah Oleh Rejim Orde Baru. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2. <https://doi.org/10.22146/jsp.11156>
- Suryatna, Y., Sumartini, A. T., Sari, D. P., & Ningrum, D. I. M. (2023). *Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VII [Pancasila Education for Junior High School Grade VII]* (First ed.). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sutherland, H. (2008). Meneliti Sejarah Penulisan Sejarah [Study of Historiography]. In H. S. Nordholt, Bambang Purwanto and Ratna Saptari (Ed.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia [The New Perspectives in Writing the Indonesian History]*. Yayasan Obor Indonesia.
- Suyasa, S. I. G. N. A. W. M. W. (2022). Perdebatan Hari Lahir Pancasila, Trisila, Dan Ekasila Berdasarkan Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Pembedaan Pancasila*, 2(1), 36-49. <https://doi.org/10.63758/jpp.v2i1.45>
- Trouillor, M.-R. (1995). *Silencing the Past: Power and The Production of History*. Beacon Press books
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 tentang Penggantian nama kawasan olahraga dari Gelora Senayan menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno (GBK), (2001).
- Wood, M. (2005). *Official History in Modern Indonesia: New Order Perceptions and Counterviews*. Koninklijke Brill NV.